



PEMERINTAH KABUPATEN
PEMALANG

2024

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat dilaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, Selain hal tersebut juga berdasarkan realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai dalam periode penganggaran satu tahun.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu diperlukan masukan dan saran dari semua pihak terkait guna penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Pemalang, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang



Drs. JOKO NGATMO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680825 199303 1 004

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, serta mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Pemalang, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pemalang



Drs. JOKO NGATMO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680825 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.....	15
2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	44
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022	8
Tabel 2.2	Tabel Form Evaluasi Indikator Kinerja Program RKPD Kabupaten Pemalang Triwulan IV Tahun 2022.....	13
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022.....	14
Tabel 2.4	Komponen Evaluasi SAKIP	16
Tabel 2.5	Capaian Realisasi Anggaran Kegiatan Diskominfo Tahun 2022	17
Tabel 2.6	Identifikasi Permasalahan Pembangunan	18
Tabel 2.7	Rancangan Awal RKPD	22
Tabel 2.8	Hasil Kesepakatan dengan Pemangku Kepentingan	38
Tabel 2.9	Usulan Hasil Musrenbang Tahun 2024	39
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.....	45
Tabel 4.1	Kerangka Pendanaan	48

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

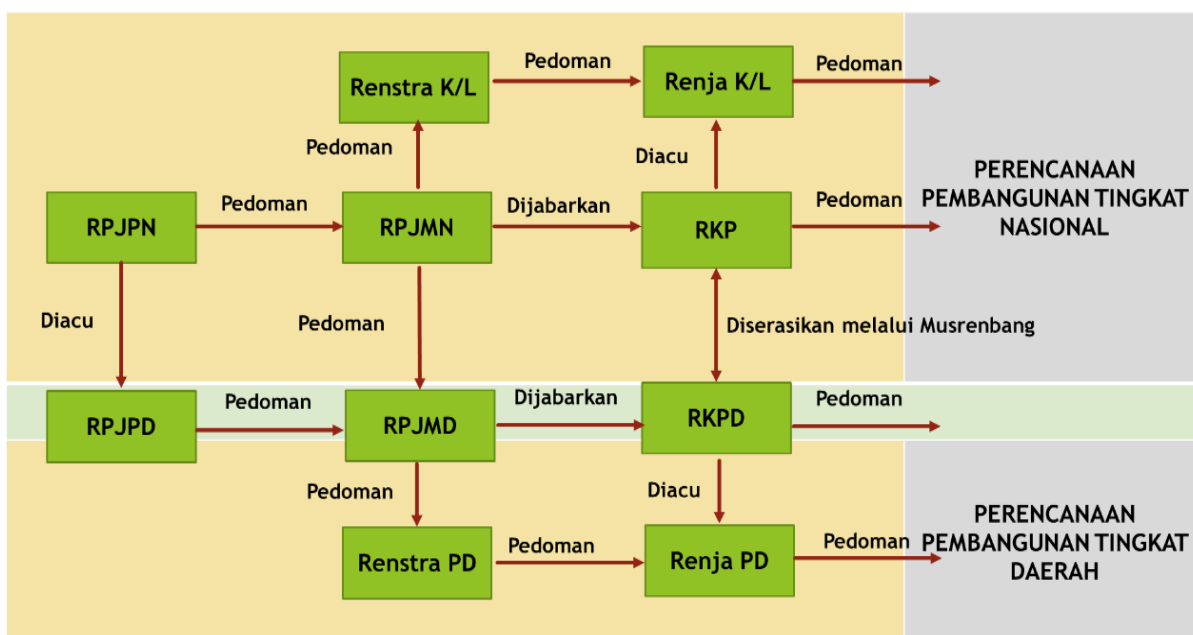
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang bertujuan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja dan Dokumen Perencanaan lainnya



Dengan demikian Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam laporan kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Visi pembangunan Kabupaten Pemalang yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni” yang selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) misi yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan misi 2 (dua) Kabupaten Pemalang yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Pengembangan sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang yang sejahtera merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 2 yaitu “ Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih”. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:

1. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas,transparasi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pemantapan kualitas aparatur melalui kelembagaan budaya kerja yang professional, bersih, beretika dan berwibawa.
3. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seluruh bidang pelayanan.
4. Pemantapan kualitas aparatur yang baik, bersih, beretika, dan berwibawa melalui peningkatan responsivitas aparatr dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
5. Pemantapan sistem demokrasi dan politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM.
6. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya masyarakat Kabupaten Pematang dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
7. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dalam rangka mendukung kemandirian daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pematang Tahun 2024, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 101);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang;
22. Peraturan Bupati Pematang Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun .

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Diskominfo adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024;

2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Diskominfo tahun 2024 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam mengemban visi misi Pembangunan Kabupaten Pemalang. Adapun sistematika adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
- 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat diketahui melalui laporan kinerja dan laporan keuangan.

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang melaksanakan 5 (lima) program, 12 kegiatan (dua belas) dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan anggaran yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika dari APBD Kabupaten Pemalang dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yaitu diperoleh sebesar Rp. 18.321.483.000,- (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 17.582.245.400,- (tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh lima empat ratus rupiah) atau capaian realisasi sebesar 95,96%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - Realisasi Rp. 9.064.526.709,-
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - Realisasi Rp. 2.523.113.417,-
3. Program Aplikasi Informatika
 - Realisasi Rp. 5.565.255.978,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Realisasi Rp. 241.724.345,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - Realisasi Rp. 187.624.951,-

Realisasi Kinerja Diskominfo Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 dapat dijelaskan melalui Tabel 2.1 Tabel Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022

No	Kode rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2022)										Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2022) (%)			OPD Penanggung jawab	Keterangan		
				Penetapan		Perubahan	I		II		III		IV		TOTAL		K	Status capaian kinerja			Rp.	Status capaian keuangan
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.	2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dukungan terhadap program penunjang urusan pemerintah daerah		16.154.900.000	17.881.843.000	2.933.010.390	3.832.639.840	3.549.432.987	6.837.812.887	-	17.152.896.104			95,92	Sangat Tinggi	Diskominfo					
	2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	60,5	8.757.197.000	9.631.140.000	0	1.691.517.850	0	2.141.071.312	62,90	2.205.762.699	3.026.175.048	63	9.064.526.709	104	Sangat Tinggi	94,12	Sangat Tinggi		
			Nilai RB	Nilai	48,25			0		52,4	0			52,37	-	109	Sangat Tinggi					
	2 16 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	242.042.000	238.395.000	25	9.813.200	25	9.863.250	25	52.451.800	25	157.840.792	100	229.769.042	100	Sangat Tinggi	96,38	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	58.386.000	76.761.000	5	4.654.450	4	2.536.250.00	2	15.060.800	3	52.363.750	14	74.615.250	100	Sangat Tinggi	97,20	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	17.950.000	25.495.000	0	2.891.000	3	2.132.000	0	2.000.000	1	17.472.600	4	24.495.600	100	Sangat Tinggi	96,08	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	14.500.000	16.795.000	3	2.009.000	1	-	0	2.417.000	0	11.796.500	4	16.222.500	100	Sangat Tinggi	96,59	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	151.206.000	119.344.000	4	258.750	3	4.995.000,00	3	32.974.000	3	76.207.942	13	114.435.692	100	Sangat Tinggi	95,89	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan	Persen	100	5.588.555.000	5.438.230.000	25	1.139.912.371	25	1.427.364.910	25	1.362.095.845	25	1.107.263.408	100	5.036.636.534	100	Sangat Tinggi	92,62	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	12	5.544.372.000	5.380.242.000	3	1.137.502.371	3	1.423.216.910	3	1.358.258.845	3	1.060.895.408	12	4.979.873.534	100	Sangat Tinggi	92,56	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2.150	10.535.000	13.285.000	742	2.110.000	549	658.000	739	2.200.000	120	7.606.000	2.150	12.774.000	100	Sangat Tinggi	96,15	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Dokumen	1	2.940.000	1.728.000	0	-	0	-	1	897.000	0	804.000	1	1.701.000	100	Sangat Tinggi	98,61	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/ Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	17	30.708.000	42.976.000	4	300.000	7	3.490.000	2	740.000	4	37.758.000	17	42.288.000	100	Sangat Tinggi	98,39	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya bimbingan teknis	Persen	100	136.158.500	852.311.500	25	-	25	137.060.350	25	157.433.934	25	555.847.000	100	850.341.284	100	Sangat Tinggi	99,77	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	kegiatan	14	-	731.073.000	0	-	0	15.997.000	12	157.433.934	2	555.847.000	14	729.277.934	100	Sangat Tinggi	99,75	Sangat Tinggi	
	2 16 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	136.158.500	121.238.500	20	-	0	121.063.350	0	-	0	20	121.063.350	100	Sangat Tinggi	99,86	Sangat Tinggi		
	2 16 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Persen	100	573.708.500	699.268.000	25	162.891.330	25	94.280.378	25	178.388.800	25	247.532.930	100	683.093.438	100	Sangat Tinggi	97,69	Sangat Tinggi	

No	Kode rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2022)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2022)										Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2022) (%)		OPD Penanggung jawab	Keterangan				
				Penetapan		Perubahan		I		II		III		IV		TOTAL		K	Rp.						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					(12=11/6*100)	Status capaian kinerja		
1	2	3	4	5				7		8		9		10		(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)	Status capaian kinerja	14					
			Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																						
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	8	41.900.000	38.180.000	3	9.649.000	3	9.132.800	0	-	2	19.357.000	8	38.138.800	100	Sangat Tinggi	99,89	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	15	26.494.500	37.248.000	7	13.201.500	4	5.224.000	0	4.557.500,00	4	12.426.000	15	35.409.000	100	Sangat Tinggi	95,06	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6930	147.800.000	196.900.000	1734	59.557.300	1390	21.242.800	2008	45.526.700,00	1800	70.221.600	6930	196.548.400	100	Sangat Tinggi	99,82	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	10	62.060.000	62.060.000	0	-	0	-	5	32.060.000,00	5	30.000.000	10	62.060.000	100	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	67	28.450.000	28.450.000	3	6.536.000	23	3.000.000	38	10.500.000,00	3	7.500.000	67	27.536.000	100	Sangat Tinggi	96,79	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	20	75.148.000	78.248.000	0	-	0	2.480.000	10	35.500.000,00	10	40.232.500	20	78.212.500	100	Sangat Tinggi	99,95	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (cinderamata dan tamu)	laporan	230	22.500.000	20.250.000	60	1.325.000	50	18.000.000	0	-	120	600.000	230	19.925.000	100	Sangat Tinggi	98,40	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	35	169.356.000	237.932.000	7	72.622.530	5	35.200.778	16	50.244.600,00	7	67.195.830	35	225.263.738	100	Sangat Tinggi	94,68	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang dan jasa BMD Daerah	Persen	100	20.880.000	110.722.000	0	2.000.000	0	0	100	18.250.000	0	88.150.000	100	108.400.000	100	Sangat Tinggi	97,90	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit	8		50.000.000	0	-	0	-	0	-	8	50.000.000	8	50.000.000	100	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	20.880.000	60.722.000	0	2.000.000	0	-	2	18.250.000	2	38.150.000	4	58.400.000	100	Sangat Tinggi	96,18	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	1.687.044.000	1.730.634.500	25	281.460.935	25	442.686.464	25	371.027.891	25	511.261.136	100	1.606.436.426	100	Sangat Tinggi	92,82	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat	5.000	45.122.500	49.713.000	1017	7.412.500	1558	11.249.554	1732	8.815.500,00	693	21.478.500	5000	48.956.054	100	Sangat Tinggi	98,48	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	372.600.000	336.600.000	3	65.241.935	3	46.294.010	3	72.904.541,00	3	104.297.086	12	288.737.572	100	Sangat Tinggi	85,76	Sedang	
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	47	50.000.000	120.000.000	12	14.475.000	8	6.615.000	12	7.120.000,00	15	86.990.000	47	115.200.000	100	Sangat Tinggi	96,00	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis	13	1.219.321.500	1.224.321.500	4	194.331.500	3	378.527.900	4	282.187.850	2	298.495.550	13	1.153.542.800	100	Sangat Tinggi	94,22	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	100	508.800.000	561.570.000	25	95.439.814	25	30.015.960	25	66.114.429	25	358.279.782	100	549.849.985	100	Sangat Tinggi	97,91	Sangat Rendah	
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	unit	46	204.250.000	257.250.000	10	82.941.814	8	15.858.960	19	48.489.429	9	102.708.414	46	249.998.617	100	Sangat Tinggi	97,18	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	jenis	8	25.000.000	20.000.000	0	-	2	-	3	10.175.000,00	3	9.750.000	8	19.925.000	100	Sangat Tinggi	99,63	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	8	74.526.000	79.296.000	3	12.498.000	2	14.157.000	0	7.450.000,00	3	41.951.368	8	76.056.368	100	Sangat Tinggi	95,91	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	gedung	4	125.033.000	125.033.000	0	-	0	-	0	-	4	124.400.000	4	124.400.000	100	Sangat Tinggi	99,49	Sangat Tinggi	
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	4	80.000.000	80.000.000	0	-	0	-	2	-	2	79.470.000	4	79.470.000	100	Sangat Tinggi	99,34	Sangat Tinggi	
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Ketersediaan Informasi Publik	Persen	75	2.235.775.000	2.621.851.000	70	383.819.880	2	531.563.186	2	566.241.761	1	1.101.488.590	75	2.523.113.417	100	Sangat Tinggi	96,23	Sangat Tinggi	

No	Kode rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2022)										Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2022) (%)		OPD Penanggung jawab	Keterangan					
					Penetapan		Perubahan		I		II		III		IV		TOTAL								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			(12=11/6*100)	Status capaian kinerja			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	(11=7+8+9+10)		14	Status capaian keuangan													
			Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	Jumlah	10			5		2		2		1		10		100	Sangat Tinggi						
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	75			70		1		3		1		75		100	Sangat Tinggi						
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Persen	45			40		2		1		2		45		100	Sangat Tinggi						
			Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	50			40		2		3		5		50		100	Sangat Tinggi						
			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	40			20		15		3		2		40		100	Sangat Tinggi						
2	16	2	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang terpapar informasi publik	Persen	35	2.235.775.000	2.621.851.000	27	383.819.880	3	531.563.186	4	506.241.761	1	1.101.488.500	35	2.523.113.417	100	Sangat Tinggi	96,23	Sangat Tinggi		
					Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik																				
					Tersedianya layanan publik yang diselenggarakan secara online																				
					Tersedianya informasi pemerintah daerah secara online																				
					Terseleenggaranya hubungan masyarakat, media, kemitraan komunitas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan																				
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	104	70.000.000	99.076.000	24	9.458.817	24	-	24	3.450.000	32	85.700.000	104	98.608.817	100	Sangat Tinggi	99,53	Sangat Tinggi	
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	1.800	324.100.000	439.887.500	450	31.161.500	450	37.794.000	450	137.923.906.00	450	230.578.600	1.800	437.458.006	100	Sangat Tinggi	99,45	Sangat Tinggi	
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (cetak balho, leaflet, benmer, spanduk, siaran keliling)	dokumen	5241	436.844.000	396.844.000	543	146.733.157	4385	117.855.310	263	15.001.000.00	50	109.078.440	5241	388.667.907	100	Sangat Tinggi	97,94	Sangat Tinggi	
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (informasi publik yang disediakan dan diperbarui, pemohon informasi publik, sengketa)	dokumen	1200	160.000.000	157.767.500	291	32.983.906	0	26.701.000	297	15.010.255	612	78.123.300	1200	152.818.461	100	Sangat Tinggi	96,86	Sangat Tinggi	
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (media cetak, media online, pernyangan future lokal, press conference, spot televisi lokal, dialog televisi lokal, spt LLM)	kegiatan	115	743.816.000	1.042.829.000	10	155.352.500	27	96.287.076.00	18	260.753.100	60	455.087.000	115	967.479.676	100	Sangat Tinggi	92,77	Sangat Tinggi	
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	kegiatan	1	130.000.000	126.213.000	0	3.630.000	1	122.217.800	0	-	0	0	1	125.847.800	100	Sangat Tinggi	99,71	Sangat Tinggi	
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meringkat Kapasitasnya	peserta	100	100.000.000	94.682.000	0	-	100	66.623.000	0	-	0	27.646.500	100	94.269.500	100	Sangat Tinggi	99,56	Sangat Tinggi	
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	kegiatan	1	40.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0,00	#DIV/0!	0,00		

No	Kode rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2022)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2022)										Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2022) (%)			OPD Penanggung jawab	Keterangan					
					Penetapan		Perubahan	I		II		III		IV		TOTAL		(12=11/6*100)		Status capaian kinerja			Status capaian keuangan				
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(11=7+8+9+10)		(12=11/6*100)		14													
			Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
	2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (KIM, Komunitas IT, sosialisasi dan pembinaan)	kegiatan	10	150.000.000	164.550.000	0	4.500.000	2	13.100.000	6	74.103.500,00	2	66.772.750	10	158.476.250	100	Sangat Tinggi	96,31	Sangat Tinggi		
	2	16	2	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Audio amplifier, kabel, kabel fiber, laptop, printer)	buah	33	81.015.000	100.002.000	0	-	30	50.985.000	0	-	3	48.502.000	33	99.487.000	100	Sangat Tinggi	99,49	Sangat Tinggi		
	2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Network terintegrasi (%)	Persen	72	5.161.928.000	5.628.852.000	71	857.672.660	0	1.160.005.342	0	837.428.527	1	2.710.149.249	72	5.565.255.978	100	sangat Tinggi	98,67	Sangat Tinggi		
							Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100			100	0	0	0	0	0	0	100			100	sangat Tinggi				
	2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkoneksinya perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah	Persen	100	4.453.975.000	4.827.086.000	100	756.031.213	0	1.094.629.042	0	710.486.359	0	2.210.166.495	100	4.771.313.109	100	sangat Tinggi	98,84	Sangat Tinggi		
							Tersedianya akses internet bagi perangkat daerah																				
	2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (koneksi jaringan, pemeliharaan, peralatan jaringan internet desa)	bulan	29	4.453.975.000	4.827.086.000	6	756.031.213	6	1.094.629.042	8	710.486.359	9	2.210.166.495	29	4.771.313.109	100	Sangat Tinggi	98,84	Rendah		
	2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Persen	100	707.953.000	801.766.000	100	101.641.647	0	65.376.306	0	126.942.168	0	499.982.754	100	793.942.869	100	Sangat Tinggi	99,02	Sangat Rendah		
							Tersedianya layanan SPBE																				
							Terselenggaranya smart city																				
	2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	134.950.000	135.570.000	0	10.111.000	0	5.311.000	1	11.688.627,00	0	107.467.500	1	134.578.127	100	Sangat Tinggi	99,27	Sangat Tinggi		
	2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	bulan	12	62.925.000	70.639.000	0	9.843.000	0	17.967.000	9	18.007.505,00	3	23.741.000	12	69.558.505	100	Sangat Tinggi	98,47	Sangat Tinggi		
	2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi	2	74.600.000	127.600.000	1	53.917.000	0	2.925.000	0	3.558.000,00	1	66.373.300	2	126.773.300	100	Sangat Tinggi	99,35	Sangat Tinggi		
	2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	webiste	1	71.950.000	71.950.000	0	1.257.000	0	3.683.000	0	4.296.000,00	1	62.633.450	1	71.869.450	100	Sangat Tinggi	99,89	Sangat Tinggi		
	2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (dokumen smart city, kegiatan, pelatihan star up)	dokumen	5	216.700.000	235.983.000	0	8.716.000	0	25.174.800	0	27.188.053,00	5	171.584.322	5	232.663.175	100	Sangat Tinggi	98,59	Sangat Tinggi		
	2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	unit	2	146.828.000	160.024.000	0	17.797.647	0	10.315.500	1	62.203.983,00	1	66.183.182	2	158.500.312	100	Sangat Tinggi	99,05	Sangat Tinggi		

No	Kode rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2022)										Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (TAHUN 2022) (%)		OPD Penanggung jawab	Keterangan		
					Penetapan		Perubahan		I		II		III		IV		TOTAL					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			(11=7+8+9+10)	(12=11/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				218.575.000	248.575.000	30.389.500	32.424.100	92.700.250	86.210.495	0	241.724.345	#DIV/0!		97,24	Sangat Tinggi	Diskominfo				
	2 20 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan statistik sektoral daerah (%)	Persen	20	218.575.000	248.575.000	15	30.389.500	2	32.424.100	1	92.700.250	2	86.210.495	20	241.724.345	100	sangat Tinggi	97,24	Sangat Tinggi	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100			25	25	25	25	25	100		100	sangat Tinggi						
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100			25	25	25	25	25	100		100	sangat Tinggi						
	2 20 2 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya buku DDA (Daerah Dalam Angka, KCA, Info Grafis)	Persen	100	218.575.000	248.575.000	25	30.389.500	25	32.424.100	25	92.700.250	25	86.210.495	100	241.724.345	100	Sangat Tinggi	97,24	Sangat Tinggi	
	2 20 2 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	kegiatan	4	100.000.000	110.000.000	0	14.631.000	0	7.575.600	4	61.059.500,00	0	25.170.564	4	108.436.604	100	Sangat Tinggi	98,58	Sangat Tinggi	
	2 20 2 2.01 2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	kegiatan	1	40.000.000	50.000.000	0	2.311.000	1	6.277.500	0	27.912.000,00	0	10.493.500	1	46.994.000	100	Sangat Tinggi	93,99	Sangat Tinggi	
	2 20 2 2.01 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (info grafis, DDA, KCA)	dokumen	3	78.575.000	88.575.000	0	13.447.500	1	18.571.000	0	3.728.750,00	2	50.546.431	3	86.293.681	100	Sangat Tinggi	97,42	Sangat Tinggi	
3	2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				181.425.000	191.425.000	14.898.451	50.673.000	17.650.000	104.403.500	0	187.624.951	#DIV/0!		98,01	Sangat Tinggi	Diskominfo				
	2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase konten informasi yang telah diamankan	Persen	40	181.425.000	191.425.000	20	14.898.451	5	50.673.000	10	17.650.000	5	104.403.500	40	187.624.951	100	Sangat Tinggi	98,01	Sangat Tinggi	
			Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen																		
	2 21 2 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (%)	Persen	40	181.425.000	191.425.000	20	14.898.451	5	50.673.000	10	17.650.000	5	104.403.500	40	187.624.951	100	Sangat Tinggi	98,01	Sangat Tinggi	
	2 21 2 2.01 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	OPD	48	119.176.400	136.064.393	10	8.805.451	14	19.551.500	12	8.990.000,00	12	95.412.500	48	132.759.451	100	Sangat Tinggi	97,57	Sangat Tinggi	
	2 21 2 2.01 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	jenis	3	62.248.600	55.360.607	1	6.093.000	1	31.121.500	0	8.660.000,00	1	8.991.000	3	54.865.500	100	Sangat Tinggi	99,11	Sangat Tinggi	

Tabel 2.2

FORM EVALUASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD KABUPATEN PEMALANG TRIWULAN IV TAHUN 2022

Program	Indikator	Satuan	Target 2022	Target akhir RPJMD 2026	Anggaran Penetapan (Rp.)	Realisasi										Capaian (%)			Keterangan	OPD Penanggung jawab	
						TW I		TW II		TW III		TW IV		TOTAL		K	Status capaian kinerja	Rp.			Status capaian keuangan
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dukungan terhadap program penunjang urusan pemerintah daerah				16,154,900,000	0	2,933,010,390		3,832,639,840		3,549,432,987				10,315,083,217			63.33	Sangat Tinggi		Dikominfo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	60.3	62	8,757,197,000	0	1,661,517,050	0	2,141,071,312	62.00	2,305,762,099	0	63	6,038,351,061	104	Sangat Tinggi	68.95	Sangat Tinggi			
	Nilai RB	Indeks	48.25	50.1		0		52.37		0		0	52		109	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Ketersediaan Informasi Publik	%	75	90	2,335,775,000	70	383,819,880	2	531,563,186	2	506,241,761	1	75	1,421,624,827	100	Sangat Tinggi	63.39	Sangat Tinggi			
	Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	Jumlah	10	30		3		2		2		1	10		100	Sangat Tinggi					
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	75	90		70		1		3		1	75		100	Sangat Tinggi					
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	45	65		40		2		1		2	45		100	Sangat Tinggi					
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	50	60		40		2		3		5	50		100	Sangat Tinggi					
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	40	40		30		5		3		2	40		100	Sangat Tinggi					
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Network terintegrasi (%)	%	72	76	5,161,928,000	71	857,672,860	0	1,160,005,342	1	837,428,527	0	72	2,858,106,729	100	Sangat Tinggi	53.31	Sangat Tinggi		Dikominfo	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100		100		0		0		0	100		100	Sangat Tinggi					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	%	20	60	218,575,000	15	30,389,500	2	32,424,100	1	92,700,250	2	20	155,513,850	100	Sangat Tinggi	71.15	Sangat Tinggi		Dikominfo	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100		25		25		25		25	100		100	Sangat Tinggi					
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100		25		25		25		25	100		100	Sangat Tinggi					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIARAN																					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIARAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase konten informasi yang telah diamankan (%)	%	40	100	181,425,000	20	14,898,451	5	50,673,000	10	17,650,000	5	40	83,221,451	100	Sangat Tinggi	43.87	Sangat Tinggi		Dikominfo	
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40	100		20		5		10		5	40		100	Sangat Tinggi					

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD (2026)	KINERJAs/d 2022 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Indeks/ Nilai Keterbukaan Informasi Publik	76	74	97,37	80,2	97,37%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Penduduk yang terpapar Informasi Publik	35	35	100	65	100%
3.	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Kabupaten	Indeks SPBE	3,35	2,23	66,67	3,4	66,67%
4.	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Persentase Network Terintegrasi	78	78	100	90	100%
5.	Meningkatnya Ketersediaan Data statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data statistik Sektoral yang berkualitas	2	2	100	8	100%
6.	Meningkatnya Keamanan Informasi untuk mendukung SPBE	Tingkat/ Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	2,3	2	86	3	86%
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Komunikasi dan Informatika	77,5	76,48	96,75	100	96,75%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan serta Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Adapun ringkasan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dicapai pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Sasaran 1 : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Pemalang

Indikator : Indeks SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 menargetkan nilai indeks SPBE yaitu sebesar 3,35, adapun realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 2,23. Nilai Indeks SPBE pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai sebesar 1,12 yang disebabkan oleh salah satu domain SPBE yaitu domain 3 manajemen SPBE dengan aspek penilaian yaitu Penerapan Manajemen SPBE dan audit TIK mendapatkan nilai kurang yaitu 1,00, sehingga mempengaruhi nilai total SPBE. Berdasarkan hal tersebut capaian indikator nilai indeks SPBE untuk tahun 2022 adalah sebesar 66,67%.

- b) Sasaran 2 : Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK

Indikator : Persentase Network Terintegrasi

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan 78% untuk indikator Persentase Network Terintegrasi. Adapun realisasinya adalah sebesar 78%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase Network Terintegrasi untuk tahun 2022 sebesar 100%.

- c) Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung SPBE

Indikator : Tingkat/Indeks kematangan keamanan informasi (KAMI)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan Tingkat/Indeks kematangan keamanan informasi (KAMI) sebesar 2,3 pada tahun 2022, adapun realisasi Tingkat/Indeks kematangan informasi (KAMI) tahun 2022 adalah sebesar 2. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Tingkat/Indeks kematangan keamanan informasi (KAMI) tahun 2022 adalah sebesar 89%.

- d) Sasaran 4 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Indikator : Indeks/ Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan nilai 76 untuk indikator Indeks/ Nilai Keterbukaan Informasi Publik, adapun realisasi adalah sebesar 74. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Indeks/ Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2022 adalah sebesar 97,37%

e) Sasaran 5 : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor

Indikator : Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor yang berkualitas.

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor yang berkualitas sebesar 2%, adapun capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 2%, maka capaian untuk indikator sasaran Persentase Ketersediaan data Statistik Sektor yang berkualitas tahun 2022 adalah sebesar 100%.

f) Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator : Persentase Penduduk yang terpapar Informasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan Persentase Penduduk yang terpapar Informasi Publik adalah sebesar 35% . Adapun realisasi yang dicapai adalah sebesar 35% Berdasarkan hal tersebut, maka capaian untuk Persentase Penduduk yang terpapar Informasi Publik tahun 2022 adalah sebesar 100%.

g) Sasaran 7 : Peningkatan kualitas layanan informasi publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menargetkan indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 77,5 %. Adapun realisasinya adalah sebesar 76,48%, berdasarkan hal tersebut, maka capaian persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Komunikasi dan Informatika tahun 2022 adalah sebesar 96,75%.

Sedangkan untuk Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2022 mendapatkan Nilai 64,75 kategori baik dengan predikat “ B “. Adapun hasil rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Komponen Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,6
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,5
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,9
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75
	Jumlah	100	64,75

Tabel 2.5
Capaian Realisasi Anggaran Kegiatan Diskominfo Tahun 2022

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 238.395.000,-	Rp. 229.769.042,-	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.438.230.000,-	Rp. 5.036.636.534,-	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 852.311.500,-	Rp. 850.341.284,-	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 699.268.000,-	Rp. 683.093.438,-	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 110.722.000,-	Rp. 108.400.000,-	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp. 1.730.634.500,-	Rp. 1.606.436.426,-	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 561.579.000,-	Rp. 549.849.985,-	
8.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.621.851.000,-	Rp. 2.523.113.417,-	
9.	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub.Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.827.086.000,-	Rp. 4.771.313.109,-	
10.	Pegelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Rp. 801.766.000,-	Rp. 793.942.869,-	
11.	Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 248.575.000,-	Rp. 241.724.345,-	
12.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp. 191.425.000,-	Rp. 187.624.951,-	

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap identifikasi permasalahan dapat dijelaskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 2.6

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENYUSUN RKPD/RENJA TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Solusi (Lokus/Vol/Satuan)	Anggaran (Rp)		Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Keterangan
					Kebutuhan	Renstra				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belum Optimalnya Pengelolaan Pengaduan masyarakat	Belum Optimalnya Pengelolaan Opini, Aspirasi, dan Pengaduan masyarakat	Rendahnya Komitmen Perangkat Daerah terhadap opini, aspirasi dan pengaduan masyarakat.	(Monitoring aspirasi dan aduan masyarakat, 48 Dokumen)	85.000.000	186.799.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
2	Belum optimalnya media komunikasi masyarakat	Belum optimalnya Pelayanan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi milik pemerintah daerah Website dan media sosial pemda	(Meningkatkan Produksi website dan medsos Kab. Pemalang, 1800 berita)	334.100.000	344.211	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
3	Belum memadainya kapasitas komunikasi masyarakat	kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media luar ruang	kurangnya Spot Iklan di Beberapa Titik	Pemasangan Spot Iklan di Beberapa Titik Strategis	450.000.000	884.626	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
4	Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Masih Rendahnya Ketersediaan dan Pelayanan Informasi Publik	Masih rendahnya komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Rakor PPID Utama dan PPID Pembantu (Dalam Daerah/3 Kali)	160.000.000	169.819.000	Pelayanan Informasi Publik			
			Rendahnya komitmen Perangkat Daerah terhadap pengaduan	Fasilitasi Sengketa Informasi (100%)						
5	belum adanya regulasi terkait media	Banyaknya Media yang tidak Memenuhi Syarat Publikasi	Belum Adanya Peraturan Bupati Yang Mengatur Tentang Media	Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Media	850.000.000	940.973.000	Layanan Hubungan Media			
6	Belum optimalnya Pelayanan Komunikasi Publik	Masih kurangnya akses dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat	Belum optimalnya kemitraan dengan pemangku kepentingan/agen informasi	Kegiatan Bakohumas (1 Kali)	130.000.000	246.236.000	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan			
7	kapasitas sumber daya komunikasi pemerintah dan literasi media masyarakat masih kurang	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengembangan Kapasitas Individu dan Kelompok Masyarakat	Belum memadainya kapasitas sumber daya komunikasi pemerintah dan literasi media masyarakat	(Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Pemerintah dan Literasi Masyarakat,100 Peserta)	100.000.000	169.818.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			
					-	63.681.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			

8	Belum optimalnya komunikasi kemitraan dengan pemangku kepentingan	Belum Optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pengembangan kapasitas individu dan kelompok masyarakat	Belum optimalnya media komunikasi masyarakat (KIM, Komunitas media tradisional, media komunitas lainnya)	Sosialisasi KIM, Komunitas IT, Saka Milenial, Desa Digital, dan FK Metra (4 kali)	230.000.000	271.708.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
9	jumlah peralatan media yang standby terbatas	Terbatasnya Peralatan media	Banyak Alat media yang Rusak	Pemeliharaan/Pengadaan Alat Media	200.000.000	169.945.000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
10	Masih terdapat wilayah/daerah di kabupaten Pemalang yang blankspot	Belum tersedianya jalur backbone fiber optic di titik kantor kecamatan (12 titik) yang harus dilayani oleh layanan jaringan infrastruktur diskominfo (Comal, Petarukan, Ulujami, Bodoh, Ampelgading, Bantarbolang, Moga, Pulosari, Belik, Randongkal, Warungpring)	Tidak ada backbone fiber optic	melakukan analisa kebutuhan terkait dengan kebutuhan backbone fiber optic serta pembuatan backbone fiber optic di masing masing titik	9.000.000.000	3.575.270	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
11	Belum optimalnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) belum dipedomani oleh OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kepala OPD beserta jajarannya belum memahami dengan baik tentang SPBE, Banyak indikator SPBE yang belum dilaksanakan oleh OPD	Sosialisasi SPBE kepada OPD lebih ditingkatkan, Pelaksanaan movev SPBE dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, Penyusunan dokumen pendukung SPBE	150.196.200	136.120.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
12	Belum optimalnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	penanganan kondisi darurat jaringan komunikasi harus disediakan	perlu supporting jaringan telekomunikasi agar tetap berfungsi walaupun dalam keadaan darurat	pemeliharaan peralatan preventif	70.639.000	514.440.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			

13	Belum optimalnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan aplikasi tidak lancar dan memakan waktu lama	Perangkat pengembangan seperti PC / Laptop dan perangkat pendukung komputer sudah tidak layak pakai, berspesifikasi di bawah rata-rata untuk pengembangan aplikasi, berumur lebih dari 5 tahun, sehingga sering terjadi gangguan perangkat yang lambat dan <i>error</i> saat proses pengembangan aplikasi	Pengadaan Perangkat Komputer dan Perangkat Pendukung Komputer dengan spesifikasi sebagai berikut : 1. 5 Buah PC AIO dengan spesifikasi minimal intel i5 gen 11th, RAM 8 GB, dan SSD 512 GB 2. 5 Pasang Keyboard dan Mouse dengan spesifikasi minimal dapat tersambung melalui koneksi nirkabel 3. 5 Buah Monitor Tambahan dengan spesifikasi minimal ukuran layar 24 inch 4. 5 Buah UPS untuk perlindungan perangkat ketika terjadi listrik mati, dengan spesifikasi minimal 650 VA	194.600.000	259.957.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		
14	Belum optimalnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Banyak aplikasi yang terbangun belum menyediakan akses untuk berbagi pakai data	OPD tidak melakukan koordinasi ke Diskominfo dalam pembangunan aplikasi, OPD belum memedomani peraturan perundang-undangan dalam pengembangan aplikasi, belum tersedianya server yang handal untuk penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Sosialisasi tentang berbagi pakai data dan tata kelola pengembangan aplikasi, pengadaan server untuk penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	71.950.000	67.807.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		
15	Belum optimalnya Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Smart City belum dilaksanakan dengan optimal	Kegiatan Forum Smart City, Dewan Smart City, dan Tim Pelaksana Smart City belum berjalan optimal, Masyarakat belum terlibat dalam pelaksanaan Smart City	Sosialisasi Smart City kepada stake holder dan masyarakat lebih ditingkatkan, Kegiatan Forum Smart City, Dewan Smart City, dan Tim Pelaksana Smart City lebih ditingkatkan	216.700.000	509.624.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		
16		Fungsi Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi atau Government Chief Information Officer (GCIO) belum dilaksanakan	Belum ada pejabat yang mempunyai kompetensi sebagai GCIO	Mengikuti bimbingan teknis GCIO, Sosialisasi GCIO kepada OPD	146.828.000	171.182.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		
							Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		

17	Belum optimalnya penerapan satu data Indonesia kabupaten Pemalang	belum tercapainya Forum Satu Data Indonesia (Kabupaten Pemalang)	belum adanya pemahaman tentang Statistik Sektoral	Dilaksanakan Sosialisasi Statistik Sektoral	100.000.000	169.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
18	Kurangnya kapasitas produsen data dalam menyediakan data statistik sektoral	belum ada pemahaman SKPD adalah sebagai produsen data	belum adanya pemahaman petugas pengelola data tentang statistik sektoral	dilaksanakan Bintek bagi petugas pengelola data statistik sektoral	40.000.000	54.000.000	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			
19	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral sesuai standar	penyebarluasan informasi terkait Pemalang Dalam Angka, Info grafis pemalang dan kecamatan dalam angka	terbatasnya informasi terkait keadaan geografis dan demografis Kabupaten Pemalang	cetak buku Pemalang Dalam Angka, buku Infografis Pemalang dan Kecamatan Dalam Angka	78.745.000	137.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral			
20	Adanya Ancaman Keamanan Informasi pemerintah	Belum maksimal dalam melaksanakan perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi	Tidak melakukan pengadaan update software dan belum mengadakan perangkat Network Analyzer	Pengadaan update software firewall dan pengadaan perangkat network analyzer	400.000.000	179.500.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
21	Belum Optimalnya tingkat kematangan Keamanan Informasi Pemerintah	Belum maksimal dalam menangani Insiden Keamanan Informasi	Belum mempunyai SDM yg memenuhi kualifikasi Incident Handler dan Digital Forensic	Peningkatan kemampuan SDM dibidang Incident Handler dan Digital Forensic	50.000.000	115.500.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
22	Belum Optimalnya tingkat kematangan Keamanan Informasi Pemerintah	Belum maksimal dalam melaksanakan Identifikasi kerentanan Sistem Elektronik	Belum mempunyai SDM yang mampu melakukan Penetration Test	Pengadaan ASN yg memenuhi kualifikasi pentester atau pengadaan jasa konsultasi pentest	100.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
				JUMLAH	13.158.758.200	4.537.913.107				

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.7
Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar					Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar					
Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika				Rp. 16.154.900.000	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika				Rp.16.154.900.000	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			100%	Rp. 8.757.197.000	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			100%	Rp. 8.757.197.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Rp. 242.042.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Rp. 242.042.000	
		Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan	100%				Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan	100%		
		Persentase administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	100%				Persentase administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12 dokumen	Rp. 58.386.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12 dokumen	Rp. 58.386.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan perangkat daerah (RKA)	4 dokumen	Rp. 17.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan perangkat daerah (RKA)	4 dokumen	Rp. 17.950.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan perangkat daerah (DPA)	4 dokumen	Rp. 14.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan perangkat daerah (DPA)	4 dokumen	Rp. 14.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (LKPJ, SAKIP, LPPD, RKPD)	11 dokumen	Rp. 151.206.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan perangkat daerah (DPA)	4 dokumen	Rp. 14.500.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan	100%	Rp. 5.588.555.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan	100%	Rp. 5.588.555.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pemalang	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai	40 orang/bulan	Rp. 5.544.372.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai	40 orang/bulan	Rp. 5.544.372.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen penatusahaan keuangan SKPD	2000 dokumen dan 150 dokumen	Rp. 10.535.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen penatusahaan keuangan SKPD	2000 dokumen dan 150 dokumen	Rp. 10.535.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	Rp. 2.940.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	Rp. 2.940.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran	12 dokumen, 4 dokumen, 1 dokumen	Rp. 30.708.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Diskominfo	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran	12 dokumen, 4 dokumen, 1 dokumen	Rp. 30.708.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya bimbingan teknis	100%	Rp. 136.158.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Terselenggaranya bimbingan teknis	100%	Rp. 136.158.500	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	20 orang	Rp. 136.158.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	20 orang	Rp. 136.158.500	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 573.708.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 573.708.500	
		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%				Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan listrik yang terbeli	8 jenis	Rp. 41.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah peralatan listrik yang terbeli	8 jenis	Rp. 41.900.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	Rp. 26.494.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	Rp. 26.494.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6930 snak dan makan	Rp. 147.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6930 snak dan makan	Rp. 147.800.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10 jenis	Rp. 62.060.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10 jenis	Rp. 62.060.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	55 buku, 12 bulan	Rp. 28.450.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	55 buku, 12 bulan	Rp. 28.450.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 573.708.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 573.708.500	
		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%				Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan listrik yang terbeli	8 jenis	Rp. 41.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah peralatan listrik yang terbeli	8 jenis	Rp. 41.900.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	Rp. 26.494.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	Rp. 26.494.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6930 snak dan makan	Rp. 147.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6930 snak dan makan	Rp. 147.800.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10 jenis	Rp. 62.060.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10 jenis	Rp. 62.060.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	55 buku, 12 bulan	Rp. 28.450.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	55 buku, 12 bulan	Rp. 28.450.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 573.708.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 573.708.500	
		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%				Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan listrik yang terbeli	8 jenis	Rp. 41.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah peralatan listrik yang terbeli	8 jenis	Rp. 41.900.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	Rp. 26.494.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	Rp. 26.494.500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6930 snak dan makan	Rp. 147.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6930 snak dan makan	Rp. 147.800.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10 jenis	Rp. 62.060.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10 jenis	Rp. 62.060.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	55 buku, 12 bulan	Rp. 28.450.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	55 buku, 12 bulan	Rp. 28.450.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara	4 gedung	Rp. 125.033.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara	4 gedung	Rp. 125.033.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	Rp. 80.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	Rp. 80.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Ketersediaan Informasi Publik	100%	Rp. 2.235.775.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Ketersediaan Informasi Publik	100%	Rp. 2.235.775.000	
		Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	100%				Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	100%		
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	100%				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	100%		
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%				Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%				Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik	100%	Rp. 2.235.775.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik			
		Tersedianya layanan publik yang diselenggarakan secara online	100%				Tersedianya layanan publik yang diselenggarakan secara online			
		Tersedianya informasi pemerintah daerah secara online	100%				Tersedianya informasi pemerintah daerah secara online			
		Terselenggaranya hubungan masyarakat, media, kemitraan komunitas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	100%				Terselenggaranya hubungan masyarakat, media, kemitraan komunitas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	3 dokumen	Rp. 70.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten pemalang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan aspirasi publik	3 dokumen	Rp. 70.000.000	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Pemalang	Jumlah produksi dan publikasi konten melalui website dan media sosial	1800 dokumen	Rp. 324.100.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten pemalang	Jumlah produksi dan publikasi konten melalui website dan media sosial	1800 dokumen	Rp. 324.100.000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Pemalang	Jumlah media komunikasi publik	4 dokumen	Rp. 436.844.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten pemalang	Jumlah media komunikasi publik	4 dokumen	Rp. 436.844.000	
Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Pemalang	Jumlah pelayanan informasi publik	6 dokumen	Rp. 160.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten pemalang	Jumlah pelayanan informasi publik	6 dokumen	Rp. 160.000.000	
Layanan Hubungan Media	Kabupaten Pemalang	Jumlah layanan hubungan media	7 layanan	Rp. 743.816.000	Layanan Hubungan Media	Kabupaten pemalang	Jumlah layanan hubungan media	7 layanan	Rp. 743.816.000	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten Pemalang	Jumlah penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan	1 dokumen	Rp. 130.000.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten pemalang	Jumlah penyelenggaraan kemitraan dengan pemangku kepentingan	1 dokumen	Rp. 130.000.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten Pemalang	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	100 orang	Rp. 100.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten pemalang	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	100 orang	Rp. 100.000.000	
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah fasilitasi komisi informasi daerah	1 dokumen	Rp. 40.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten pemalang	Jumlah fasilitasi komisi informasi daerah	1 dokumen	Rp. 40.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Pemalang	Jumlah penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	dokumen	Rp. 150.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten pemalang	Jumlah penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	dokumen	Rp. 150.000.000	
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	1 unit, 8 unit, 21 meter, 1 unit, 2 unit	Rp. 81.015.000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten pemalang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	1 unit, 8 unit, 21 meter, 1 unit, 2 unit	Rp. 81.015.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Network terintegrasi	100%	Rp. 5.161.928.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Network terintegrasi	100%	Rp. 5.161.928.000	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terkoneksinya perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah	100%	Rp. 4.453.975.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terkoneksinya perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah	100%	Rp. 4.453.975.000	
		Tersedianya akses internet bagi perangkat daerah	100%				Tersedianya akses internet bagi perangkat daerah	100%		
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	67 unit, 12 bulan, 5 desa	Rp. 4.453.975.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 sekitar majakerta dan 4 blankspot	Jumlah penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	67 unit, 12 bulan, 5 desa	Rp. 4.453.975.000	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100%	Rp. 707.953.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra	100%	Rp. 707.953.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Tersedianya layanan SPBE	100%				Tersedianya layanan SPBE	100%		
		Terselenggaranya smart city	100%				Terselenggaranya smart city	100%		
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen tata kelola	1 dokumen	Rp. 134.950.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen tata kelola	1 dokumen	Rp. 134.950.000	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	12 bulan, 1 dokumen	Rp. 62.925.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	12 bulan, 1 dokumen	Rp. 62.925.000	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Pemalang	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	1 unit aplikasi	Rp. 74.600.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Pemalang	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	1 unit aplikasi	Rp. 74.600.000	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Pemalang	Jumlah penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	1 website	Rp. 71.950.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Pemalang	Jumlah penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	1 website	Rp. 71.950.000	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Pemalang	Jumlah pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	1 dokumen, 3 kegiatan, 1 paket	Rp. 216.700.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Pemalang	Jumlah pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	1 dokumen, 3 kegiatan, 1 paket	Rp. 216.700.000	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	2 unit	Rp. 146.828.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	2 unit	Rp. 146.828.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	100%	Rp. 218.575.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	100%	Rp. 218.575.000	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya buku DDA (Daerah Dalam Angka)	100%	Rp. 218.575.000			Tersusunnya buku DDA (Daerah Dalam Angka)	100%	Rp. 218.575.000	
		Tersusunnya buku KCA (Kecamatan Dalam Angka)	100%				Tersusunnya buku KCA (Kecamatan Dalam Angka)	100%		
		Tersusunnya buku Info Grafis	100%				Tersusunnya buku Info Grafis	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Pematang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	4 dokumen	Rp. 100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Pematang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	4 dokumen	Rp. 100.000.000	
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Pematang	Jumlah SDM yang meningkatkan kapasitasnya dengan peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	50 orang	Rp. 40.000.000	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Pematang	Jumlah SDM yang meningkatkan kapasitasnya dengan peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	50 orang	Rp. 40.000.000	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Pematang	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral	3 dokumen	Rp. 78.575.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Pematang	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral	3 dokumen	Rp. 78.575.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase konten informasi yang telah diamankan	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase konten informasi yang telah diamankan	100%		
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%				Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya kegiatan strategis yang diamankan dengan kegiatan pengamanan sinyal	100%		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya kegiatan strategis yang diamankan dengan kegiatan pengamanan sinyal	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
		Tersusunnya sistem elektronik yang menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100%				Tersusunnya sistem elektronik yang menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100%		
		Tersedianya sistem informasi yang telah diaudit	100%				Tersedianya sistem informasi yang telah diaudit	100%		
		Tersusunnya titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	100%				Tersusunnya titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	100%		
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Pemalang	Jumlah fasilitasi kemanan informasi pemerintah daerah berbasis leketronik dan non elektronik	48 laporan	Rp. 119.176.400	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Pemalang	Jumlah fasilitasi kemanan informasi pemerintah daerah berbasis leketronik dan non elektronik	48 laporan	Rp. 119.176.400	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah layanan kemanan informasi pemerintah daerah yang tersedia	3 unit	Rp. 62.248.600	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah layanan kemanan informasi pemerintah daerah yang tersedia	3 unit	Rp. 62.248.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah (FPD) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 maka diperoleh hasil kesepakatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Hasil Kesepakatan dengan Pemangku Kepentingan

No	Nama Pekerjaan	Sub Kegiatan	Lokasi
1.	Promosi/publikasi potensi wisata daerah lewat PT. KAI	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Kabupaten Pemalang
2.	Dukungan terhadap FK Metra (Kaloka) dalam kegiatan dokumentasi/publikasi tarian/kebudayaan daerah.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Pemalang
3.	Bimbingan teknis kepada Wartawan agar memperkuat peran media dalam publikasi informasi .	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten Pemalang
4.	Pemeliharaan CCTV	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Pemalang
5.	Pemutaran musik daerah di objek wisata dan layanan publik	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Pemalang
6.	Mengalokasi anggaran untuk wartawan	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Pemalang
7.	Sinergi Dukungan sarana infrastruktur terkait tower dan fiber optic	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Pemalang
8.	Memperkuat Program Smart City	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Pemalang

Selain Forum Perangkat Daerah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang juga mendapatkan alokasi Anggaran yang bersumber dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yaitu dapat dijelaskan pada tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Usulan Musrenbang Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	ANGGARAN
47	Ampelgading	Kemuning	Pelatihan Komputer (IT) (DISKOMINFO)	Pelatihan Komputer Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading, Anggaran Rp 30.000.000	Desa Kemuning Kecamatan Ampelgading, Kab. Pematang	Dinas Komunikasi dan Informatika	30,000,000
70	Moga	Moga	Pelatihan Komputer (IT) (DISKOMINFO)	Pelatihan Komputer, Lokasi Desa Moga Kecamatan Moga, Volume 1 Paket (25 orang), Rp. 40.000.000,-	Desa Moga Kecamatan Moga, Kab. Pematang	Dinas Komunikasi dan Informatika	40,000,000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan fokus arah kebijakan prioritas RKP yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”, dengan prioritas daerah diarahkan pada :

- a) Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c) Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;
- d) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas;

- e) Pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang yaitu :

- a) Visi

Visi Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.

Penjelasan Visi :

Dalam visi tersebut di atas terdapat Empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, yaitu:

1. Adil,

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2. Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

3. Agamis

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

4. Ngangeni

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

b) Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Pencapaian Visi “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni” ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Misi pertama Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari:

- a. ancaman politik;
- b. ancaman bencana; dan
- c. ancaman ketertiban dan ketenteraman perlindungan masyarakat.

Bentuk dari ancaman politik antara lain Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik; Pelanggaran HAM; isu politik. (catatan: konflik SARA dapat dikaitkan dengan kemunculannya pada saat Pemilu, Pilpres, Pilkada). Dekriminasi.

Ancaman bencana, meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

2. Misi kedua Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis,

transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsive dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif. Pemerintah harus mewujudkan pelayanan public yang prima dengan mengedepankan kemudahan akses dan transparansi

3. Misi ketiga Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat Kabupaten Pemalang yang menerapkan nilai-nilai agama dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat. Selain itu misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dalam hal pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.

4. Misi keempat Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI)

5. Misi kelima Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry,

potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan: DEWI, KOIN)

6. Misi Keenam Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengimplementasikan Visi Pembangunan Pemalang 2021-2026, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan misi 2 (dua) Kabupaten Pemalang yaitu “ *Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.*”

Pengembangan sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang yang sejahtera merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 2 yaitu “ *Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.*” Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:

8. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Pemantapan kualitas aparatur melalui kelembagaan budaya kerja yang professional, bersih, beretika dan berwibawa.
10. Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada seluruh bidang pelayanan.
11. Pemantapan kualitas aparatur yang baik, bersih, beretika, dan berwibawa melalui peningkatan responsivitas aparatur dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
12. Pemantapan sistem demokrasi dan politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan dan HAM.
13. Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri budaya

masyarakat Kabupaten Pemalang dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.

14. Pemantapan kerjasama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dalam rangka mendukung kemandirian daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun rencana program dengan formulasi tujuan berikut:

1. Digitalisasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Pemalang
2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik
3. Peningkatan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sedangkan sasaran yang akan dituju dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan TIK menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral
4. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.
5. Meningkatnya kualitas layanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Keterkaitan antara tujuan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dengan sasaran tampak dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Satuan	Tahun 2020	Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1`		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pemalang	Indeks SPBE			Indeks	3,34	3,34	3,35	3,36	3,37	3,38	3,4
		Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan TIK	Persentase Network Terintegrasi		70,73	74	78	82	88	90	90
		Meningkatnya keamanan informasi untuk mendukung SPBE	Tingkat/Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Indeks	2	2,2	2,3	2,4	2,5	3	3
Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik			Indeks/Nilai	74,83	75	76	77	78	79	80,2
		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persen	0,5	1%	2%	4%	5%	8%	8%
		Meningkatnya kualitas Layanan Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Penduduk yang terpapar informasi publik	Persen	17,2	25	35	45	55	65	65
			IKM Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks/Nilai	72,75	75	77,5	80	82,5	85	85
Peningkatan kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika		Meningkatnya kualitas layanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP	nilai	59,83	60	60,5	61	61,5	61,7	62
			Nilai RB	Nilai	47,80	48	48,25	48,55	49,05	49,5	50, 1

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2023 maka diperlukan rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dalam merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya yaitu :

- a) Keserasian dan keterpaduan pembangunan Diskominfo dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021– 2026.
- b) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan.

Secara garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 5 (lima) program yaitu : program penunjang urusan pemerintahan, program informasi dan komunikasi publik, program aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
2. Terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022, dan sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintah Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rumusan Rancangan Awal Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel. 4.1 sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PEMALANG
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						9.213.790.900,00								3.619.159.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.103.795.900,00							3.344.359.000,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.693.396.900,00							3.274.359.000,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.118.396.900,00						-	3.221.559.000,00		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Pangangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	142.722.000,00				3.	-	-	131.902.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	12.670.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.	-		37.974.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	26.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.	-		11.533.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	28.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		11.093.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	129.998.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		71.300.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.256.381.300,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	534.052.650,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.256.303.300,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		514.983.650,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2012 Dokumen	26.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		7.920.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	26.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		28.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	26.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		11.121.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.010.000,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		310.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				100 Orang	9.910.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				400 Orang	100.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.791.000,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	316.542.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	325.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	2.120.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		27.742.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.400.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		110.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.496.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		71.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	450.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		14.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	60.000,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	60.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.551.620.000,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	1.679.061.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	17.200.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	338.640.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	240.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.195.540.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		1.206.061.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	103.812.600,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	102.960.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	60.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	210.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	582.600,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	425.000.000,00					-	-	52.800.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	425.000.000,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	52.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				3 Dokumen	50.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		52.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah</i>				2 Dokumen	50.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>				4 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>				3 Dokumen	170.000.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>				5 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Hubungan Media</i>				7 Layanan	50.000.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>				3 Dokumen	50.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya</i>				100 Orang	25.000.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>				4 Dokumen	39.850.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				15 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	2.150.000.000,00						-	0,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.085.496.600,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>				1 Unit	2.085.496.600,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	64.503.400,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	108.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	100.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>				1 Unit	100.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah														
			<i>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>				1 Layanan	100.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City</i>				1 Dokumen	63.995.400,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>				2 Dokumen	100.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						75.000.000,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	75.000.000,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75.000.000,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>				4 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangun an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>				100 Orang	15.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>				4 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				1 Laporan	248.983.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				41 Perangkat Daerah	51.017.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangunan an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	NON URUSAN						109.995.000,00							274.800.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						109.995.000,00							274.800.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	109.995.000,00						-	274.800.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	109.935.000,00			-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangunan an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	219.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	12.960.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangunan an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		19.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	96.975.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan p emerataan pembangunan an dan pem eliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	60.000,00			-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	60.000,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	- Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.103.795.900,00							3.344.359.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						35.399.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	35.399.000,00			-	5. Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah 3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-	-	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	35.399.000,00	- Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Pemantauan tata kelola pemerintahan dan kondisitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah 3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota	-		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
J U M L A H								9.213.790.900,00							3.619.159.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2024, sebagai evaluasi rencana kerja tahunan tahun 2022. Rancangan Akhir Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Rancangan Awal Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidang dan tugas fungsinya, serta mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2024, yang lebih terkoordinasi, sekaligus mencapai Visi Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2021-2026 yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini sehingga *outcome* yang diharapkan dapat tercapai.

Perubahan dan dinamika perkembangan TIK yang pesat tentu juga akan menjadi tantangan bagi Diskominfo, tetapi dengan dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Diskominfo beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan langkah-langkah pencapaian kinerja dapat lebih *agile* dan tepat sasaran.

Demikian penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang, kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja ini masih terdapat kekurangan, Oleh sebab itu diperlukan masukan dan saran dari semua pihak terkait guna penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Pemalang, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang

Drs. JOKO NGATMO, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19680825 199303 1 004



